

---

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PROVINSI JAMBI**

Oleh:

**Ahmad Soleh**

Dosen STIE Muhammadiyah Jambi

Abstrak

***PENDAHULUAAAN****Latar Belakang*

Sampai saat ini upaya mencari potret atau sosok pemerintahan yang ideal masih menjadi isu paling menarik. Pemerintahan yang ada baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif masih dinilai kurang memiliki kinerja untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan merespon perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif atau birokrasi yang semula dibentuk untuk memecahkan masalah-masalah publik justru kemudian menjadi sumber masalah dari pemecahan masalah-masalah publik itu sendiri karena cenderung mengidap penyakit birokrasi yang dikenal dengan “*bureaupathologie*”. lembaga legislatif yang dibangun untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengontrol kinerja pemerintah juga menjadi sumber masalah karena rendahnya kemampuan dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat dan semakin tidak memiliki kewibawaan karena mudah dikendalikan oleh pihak-pihak yang berkuasa.

Dengan melihat kondisi yang ada hal yang dapat di jadikan acuan dalam melihat tingkat kemampuan daerah adalah Kinerja Keuangan. Adapun alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah, diantaranya adalah analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Rumusan masalah* dalam penelitian ini adalah ingin melihat tingkat kinerja Keuangan di Provinsi Jambi dengan tujuan untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Provinsi Jambi.

**Kata kunci: Kinerja daerah. Keuangan daerah, anggaran belanja daerah.**

---

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### *Teori-Teori Keuangan*

#### *Teori Produksi*

Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input, sedangkan jumlah produksi selalu disebut sebagai output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu :

$$Q = f(K,L)$$

Dimana, Q adalah output, K adalah kapital (modal), dan L adalah tenaga kerja (labor). Persamaan tersebut merupakan gambaran sederhana dan bersifat umum mengenai keterkaitan antar faktor-faktor produksi dan jumlah produksi.

#### *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Dalam penyelenggaraan desentralisasi perlu adanya suatu penyerahan, dan pelimpahan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab yang diikuti dengan pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk dalam perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut didasarkan pada tiga fungsi utama yang diemban oleh Pemerintah yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Berdasarkan pada Penjelasan atas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah. Sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat.

Menurut Musgrave (1991:6) bahwa baik dalam teori maupun praktek keuangan negara selalu mengalami perkembangan, yang juga telah mencakup proses politik guna mencapai keputusan. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi diantara berbagai tingkat pemerintah serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan publiknya (Devas dalam Tjandra, 2006:105).

#### *Keuangan Daerah*

Menurut UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umum pasal 156 ayat (1) disebutkan, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut..

Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu : **pertama**, semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah, dan **kedua**, kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

#### *Konsep Kinerja Keuangan Daerah*

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode analisis yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi periode 2001 – 2011 maka digunakan model :

##### **a. Pengukuran Indeks**

Pengukuran indeks ini pada dasarnya merupakan rata-rata dari ketergantungan fiskal, kemampuan penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal dan kontribusi sektor pemerintah yaitu :

- ***Ketergantungan Fiskal***
- ***Kapasitas Penciptaan Pendapatan***
- ***Proporsi Belanja Modal***
- ***Kontribusi Sektor Pemerintah***

Adapun model yang digunakan untuk mengukur Indeks Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut :

$$IKKP = \frac{(100 - KF)_{i,t} + KCP_{i,t} + PBM_{i,t} + KSP_{i,t}}{4}$$

Dimana :

IKKP = Indeks kinerja Keuangan Pemerintah

KF<sub>i,t</sub> = Ketergantungan Fiskal Provinsi Jambi, nilainya diperoleh dari :

$$KF = \text{DAU (-belanja pegawai)} / \text{Total Pendapatan Daerah} * 100\%$$

Angka ketergantungan fiskal terhadap keuangan daerah bersifat negatif artinya semakin besar nilainya semakin tidak baik bagi keuangan daerah dan sebaliknya, maka untuk menyamakan dengan variabel lainnya yang bersifat positif, harus dikonversi dengan mengurangi angka 100 terhadap angka ketergantungan fiskal agar bersifat positif.

KPC<sub>i,t</sub> = Kapasitas Penciptaan Pendapatan Provinsi Jambi, nilainya diperoleh dari :

$$KPC = \text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{PDRB} * 100\%$$

PBM<sub>i,t</sub> = Proporsi Belanja Modal Provinsi Jambi, nilainya diperoleh dari :

$$PBM = \text{Belanja Modal} / \text{Total Belanja Daerah} * 100\%$$

KSP<sub>i,t</sub> = Kontribusi Sektor Pemerintah Provinsi Jambi, nilainya diperoleh dari :

$$KSP = \text{Total Belanja Pemerintah} / \text{PDRB} * 100\%$$

Asumsi penilaian terbaik dalam interpretasi indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

- |                                    |                 |        |
|------------------------------------|-----------------|--------|
| 1. Ketergantungan Fiskal           | → Nilai terbaik | = 100* |
| 2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan | → Nilai terbaik | = 10   |
| 3. Proporsi Belanja Modal          | → Nilai terbaik | = 60   |
| 4. Kontribusi Sektor Pemerintah    | → Nilai terbaik | = 20   |

Ket :

\* = karena bersifat negatif terhadap perekonomian maka dikonversi dengan mengurangi angka 100 dengan angka 0

Kemudian mencari nilai rata-rata atas semua asumsi nilai terbaik dari keempat indikator, yaitu :

$$\text{Rata-rata} = \frac{100 + 10 + 60 + 20}{4} = 50 \text{ (pembulatan)}$$

Sehingga diperoleh nilai kategori kinerja keuangan sebagai berikut :

Kategori	Kinerja Ekonomi Daerah
Tidak Baik	< 20
Kurang Baik	>20 – 30
Cukup Baik	>30 – 40
Baik	>40 - 50
Sangat Baik	>50

**HASIL PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model yang ada maka diperoleh hasil bahwa indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi secara umum dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 adalah CUKUP BAIK, yang tercermin dari besarnya nilai Indeks Kinerja Keuangan yang ada.

Besarnya nilai Indek Kinerja Keuangan yang ada tersebut merupakan rata-rata perhitungan dari empat indikator yang dijadikan ukuran diantaranya tingkat ketergantungan fiskal, kapasitas penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal dan kontribusi sektor pemerintah. Semakin membaiknya nilai dari keempat indikator tersebut maka akan semakin baik pula Indeks Kinerja Keuangan Provinsi Jambi.

**Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2001-2011**

Tahun	Ketergantungan Fiskal	Kapasitas Penciptaan Pendapatan	Proporsi Belanja Modal	Kontribusi Sektor Pemerintah	Indeks Kinerja Keuangan	Kriteria
2001	11,85	0,64	28,45	2,68	29,98	Cukup Baik
2002	13,04	1,03	31,96	3,84	30,95	Cukup Baik
2003	6,27	1,65	34,29	4,92	33,65	Cukup Baik
2004	9,29	2,06	28,58	5,48	31,71	Cukup Baik
2005	11,18	2,25	36,16	6,12	33,34	Cukup Baik
2006	19,27	2,52	35,54	8,66	31,86	Cukup Baik
2007	10,66	2,68	35,35	9,55	34,23	Cukup Baik
2008	2,78	2,97	37,67	10,56	37,11	Cukup Baik
2009	4,72	3,05	28,98	10,24	34,39	Cukup Baik
2010	5,42	3,93	31,31	8,52	34,59	Cukup Baik
2011	6,21	5,19	29,64	9,23	34,46	Cukup Baik

Sumber : Data diolah

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Provinsi Jambi tidak mengalami perbaikan menuju arah yang lebih baik. Dengan melihat kecenderungan dan pergerakan Kinerja Keuangan tersebut maka dalam beberapa tahun kedepan Kinerja Keuangan Provinsi Jambi masih belum mengalami perbaikan menuju kondisi yang lebih baik

---

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa Indeks Kinerja Keuangan Provinsi Jambi Selama kurun waktu 10 tahun terakhir pada kondisi **Cukup Baik**

### ***Saran***

Dengan melihat kondisi yang ada, guna meningkatkan kinerja ekuangan pemerintah rovinsi Jambi maka diharapkan pemerintah lebih berupaya dalam meningkatkan indikator indikator sehingga dapat memberikan peranan positif dalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah provinsi jambi.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Priyo H., dan Tribudi, Susilo G., 2005, *Analisis Kinerja Keuangan APBD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)*, Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama, Surabaya.
- Arief, Sritua, 1998, *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, CIDES, Jakarta.
- Arsyad, L. 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi keempat, Bagian Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta
- Azhar, Mhd.Karya Satya, 2008, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*, Tesis, Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan
- Basri, Faisal, 2009, *Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2001-2010, *Jambi Dalam Angka*, Jambi
- Badan Pusat Statistik (2004), *Analisis Kemiskinan , ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2010, *penyempurnaan Penyusunan Indeks Pembangunan Regional*, Katalog BPS 3102009, CV. Nario Sari, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2011, *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011*, Katalog BPS 3205015, CV. Nario Sari, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan (Laporan Sosial Indonesia Tahun 2007)*, Katalog BPS 4101005, CV. Nario Sari, Jakarta.

- 
- Bappenas, 2003, *Peta Kemampuan Daerah Propinsi Dalam Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah*, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah
- Bappenas dan UNDP, 2004, *Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah : Alat-Alat Praktis Dari Indonesia*, UNDP Indonesia
- 
- Daerah dan Kebijakan Desentralisasi : Suatu Analisis tentang Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Vol. 4 No. 2, 7- 41.
- Batafor, Gregorius behi, 2011, *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat kabupaten Lembata- Provinsi NTT*, Tesis, Program Magister Manajemen Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar
- Halim, Abdul dan Jamal, A. Nasir, 2001, *Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang*, Majalah Manajemen Usahawan Indonesia, No. 26/TH XXXV
- Handayani, 2009, *Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Periode 1998-2002)*, Ekobis, Vol.6, No. 1, Januari 2005
- Hidayat, Syurya, Artikel : *Fenomena Ekonomi Moneter Dalam Konteks pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jambi
- Hidayat, 2000, *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang
- Hidayat P., Pratomo W.A., Harjito D.A., 2007, *Analisis Kinerja keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara*, Jurnal Ekonomi Pembangunan : Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Medan
- Kuncoro,Mudrajat, 2000, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan*, Prisma Vol. IV, 3-17.
- Kuncoro,Mudrajat, 1997, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta
- Landiyanto, Erlangga Agustino, 2005, *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya*, CURES Working paper No. 05/01, January 2005, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya
- Lindawati,Tita, 2001, *Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah DKI Jakarta dalam Melakukan Pinjaman*, Tesis S2 Pasca Sarjana UGM (Tidak dipublikasikan).
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

- 
- Mahsun, Mohamad. 2006, dalam Suyana, Utama M. 2007, *Pengaruh kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001 – 2006. Studi Kasus Pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.* (tidak dipublikasikan).
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Matheus A.B.H. Dacosta 2002, *Kemandirian Kota Kupang Ditinjau dari Aspek keuangan Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah.* Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta” (tidak dipublikasikan).
- Noviyanto, Hery, 2005, *Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Simposium Nasional Akuntansi 5. Semarang.
- Pasrah, Rudi, 2007, *Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan*, Kajian Ekonomi, Vol 6 No.2, 198-221.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29, Tahun 2002 jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13, Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2006. Depdagri RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105, Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41, Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2006. Depdagri RI.
- Pracoyo, Tri Kunawangsih, 2007, *Aspek Dasar Ekonomi Makro Di Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Samson, A.K. 2001, *Indikator-indikator Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Barito Kuala 1995/1996 – 1999/2000*, Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi. Vol. 1 No. 1.
- Saragih, Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. 2007, *Analisa PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran.* The 1st Accounting Conference. Jakarta.
- Setiono, Dedi Ns., 2011, *Ekonomi Pengembangan Wilayah : Teori dan Analisis*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFEUI), Jakarta.
- Soleh, Ahmad, 2012, *Analisis Perekonomian dan Perubahan struktur Ekonomi Provinsi Jambi*, Tesis S2, Program Pasca Sarjana Universitas Jambi, Jambi

- 
- Subandi, 2011, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Sularso, Havid dan Restianto, Yanuar E., 2011, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, Media Riset Akuntansi, Vol.1 No. 2 Agustus 2011
- Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Andi Yogyakarta
- Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia, 2008, *Perbandingan Indikator Efisiensi dan Efektivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*. “Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya” (tidak dipublikasikan).
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Adi, Priyo Hari. 2007, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi*, Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama, Surabaya.
- Tambunan, Tulus, 2012, *Memahami Krisis : Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta
- Tan, Syamsurizal. 2010, *Perencanaan Pembangunan : Teori dan Implementasi Pada Pembangunan Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Jambi
- Tasman, Aulia, Kamis, 04 Agustus 2011, [www.jambiexpres.co.id/opini/20246-menjaga-momentum-jambi-emas.html](http://www.jambiexpres.co.id/opini/20246-menjaga-momentum-jambi-emas.html).
- Tim Penulis : Murti, Bisma; Trisnantoro, Laksono; Probandari, Tri; Maryanti, A.Heru; Hardianto, Deni; Hasanbasri, Mubasyir; Wisnuputri, titik; 2006, *Perencanaan dan Penganggaran Untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tim Penulis : Fatimah, Dati; Aditya, M. Yana; Baswir, Revrison; Adriono, Rinto; W. Basjir, Wahyu; IDEA (Institute Economic Analysis), 2000, *Nestapa Pembangunan Sosial : Studi Atas Dampak Beban Utang Terhadap Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan*, Yayasan Litera Indonesia.
- Tjandra, 2006, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Todaro, Michael P., 2006, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi ke sembilan, Jilid 1, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Widodo, Suseno Triyanto, 1995, *Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan perekonomian Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta
- World Bank, 2003b, *Kota-Kota Dalam Transisi : Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia*, Working Paper No. 7

---

Yamin, Mohamad, 2000, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Irian Jaya*, Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.

Yustika, Abdul S, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.